

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, Juli 2023, Halaman 386-392
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8126501>

Peran Pemerintah Dalam Menangani Infrastruktur Perbatasan Negara Yang Masih Terbatas

Maria Yovita Naif¹, Karolus Kevin Sylton Mahe², Monika Prisila Sarah³, Veren Victoria Dangga⁴, Yohanes Arman⁵

¹²³⁴⁵Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Email: vithanaif4@gmail.com*

Abstrak

Banyak negara dengan perbatasan terbatas menghadapi tantangan serius dalam mengembangkan infrastruktur yang memadai. Faktor-faktor seperti topografi yang sulit, akses yang terbatas ke sumber daya, dan konflik atau ketegangan di perbatasan dapat melemahkan pembangunan infrastruktur yang efektif. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam mengatasi kendala tersebut. Metode Penelitian Meta-Analisis: Metode ini melibatkan analisis statistik terhadap hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Meta-analisis menggabungkan data dari beberapa penelitian untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih kuat dan umum. Kendala Infrastruktur Perbatasan Negara:pemerintah dapat mencari solusi melalui kerjasama regional dan internasional, alokasi anggaran yang tepat, penyesuaian regulasi, dialog politik, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Infrastruktur yang Tebatas,Dengan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah dapat mengatasi kendala pembangunan infrastruktur perbatasan yang masih terbatas.tujuan upaya peningkatan infrastruktur perbatasan negara yang terbatas. Berikut adalah beberapa peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah: Perencanaan Infrastruktur: Dengan memprioritaskan investasi dan perencanaan yang baik dan berkelanjutan dengan menggerakkan semua komponen terkait atau stekholder untuk dapat memenuhi manfaat serta mencapai tujuan sehingga pemerintah dapat memastikan bahwa infrastruktur perbatasan menjadi landasan yang kuat untuk kemajuan negara secara keseluruhan.

Kata Kunci: *Infrastruktur Perbatasan, Peran Pemerintah*

Abstract

Many countries with limited borders face serious challenges in developing adequate infrastructure. Factors such as difficult topography, limited access to resources, and conflict or tension at borders can weigh on effective infrastructure development. Therefore, the role of government is very important in overcoming these obstacles. Research Methods Meta-Analysis : This method involves statistical analysis of the results of research that has been done before. Meta-analysis collects data from several studies to obtain stronger and general conclusions. Constraints on State Border Infrastructure: the government can seek solutions through regional and international cooperation, proper budget allocation, regulatory adjustments, political dialogue, and active participation of the community in decision-making processes decisions. The Government's Role in Overcoming Limited Infrastructure, With a comprehensive approach and involving various stakeholders, the government can overcome the constraints of border infrastructure development which are still limited. The following are some of the roles that can be played by the government: Infrastructure Planning: The government must carefully plan the infrastructure development of the country's borders. This involves needs assessment, risk analysis, and development of long-term plans to ensure the border infrastructure can meet future demands. Overall, the government's role in handling state border infrastructure is still very important in maintaining national security, law, supporting the economy, managing migration and resources, strengthening relationships, and overcoming disasters. By

prioritizing good and sustainable investment and planning by mobilizing all related components or stakeholders to be able to fulfill benefits and achieve goals so that the government can ensure that the basic infrastructure becomes a strong foundation for the progress of the country as a whole.

Keywords: *Border Infrastructure, The Role Of Government*

PENDALUHUAN

Dalam konteks globalisasi dan pertumbuhan penduduk, infrastruktur perbatasan negara sangat penting untuk mengamankan wilayah suatu negara dan memfasilitasi perdagangan internasional. Namun, banyak negara menghadapi kendala dalam mengembangkan infrastruktur perbatasannya, terutama di daerah yang terpencil atau memiliki sumber daya yang terbatas. Dalam tulisan ini akan dibahas peran pemerintah dalam penanganan infrastruktur perbatasan negara yang terbatas, serta tujuan, manfaat, pembahasan, kesimpulan, dan saran terkait topik ini.

Infrastruktur perbatasan yang baik merupakan landasan penting bagi keberhasilan kebijakan keamanan nasional dan hubungan bilateral. Namun, banyak negara dengan perbatasan terbatas menghadapi tantangan serius dalam mengembangkan infrastruktur yang memadai. Faktor-faktor seperti topografi yang sulit, akses yang terbatas ke sumber daya, dan konflik atau ketegangan di perbatasan dapat melemahkan pembangunan infrastruktur yang efektif. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam mengatasi kendala tersebut.

Keamanan: Infrastruktur perbatasan yang baik dan terkelola dengan baik menjadi faktor kunci dalam menjaga keamanan nasional. Pemerintah bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara infrastruktur perbatasan yang dapat mengontrol akses masuk dan keluar negara, serta mencegah ancaman keamanan seperti penyelundupan manusia, perdagangan ilegal, dan ancaman terorisme.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Meta-Analisis : Metode ini melibatkan analisis statistik terhadap hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Meta-analisis menggabungkan data dari beberapa penelitian untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih kuat dan umum. Kendala

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala Infrastruktur Perbatasan Negara

Berbagai kendala kerap dihadapi pemerintah dalam membangun infrastruktur perbatasan negara yang terbatas. Beberapa kendala utama yang mungkin dihadapi pemerintah dalam konteks ini meliputi: **Kendala Anggaran:** Pembangunan infrastruktur yang komprehensif dan modern yang membutuhkan investasi besar. Pemerintah mungkin menghadapi kendala anggaran dalam membiayai proyek infrastruktur ini, terutama jika negara tersebut memiliki sumber daya keuangan yang terbatas. **Kondisi Geografis yang Menantang:** Batas-batas wilayah seringkali secara geografis tidak dapat diakses dan sulit. Daerah pegunungan, gurun, hutan, sungai, dan badan air dapat menjadi hambatan untuk membangun infrastruktur yang efektif. Membangun jalan, jembatan atau fasilitas transportasi lainnya di daerah tersebut dapat melibatkan tantangan teknis yang signifikan.

Konflik dan Ketegangan Politik: Beberapa perbatasan negara mungkin mengalami konflik dan ketegangan politik yang menghambat upaya pembangunan infrastruktur. Sengketa wilayah, klaim kedaulatan, dan masalah politik lainnya dapat memengaruhi kerja sama antar negara dan mencegah pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk membangun batas infrastruktur.

Perbedaan Hukum dan Peraturan: Negara-negara yang berbatasan sering kali memiliki perbedaan dalam undang-undang, peraturan, dan standar teknis. Hal ini dapat merugikan harmonisasi dan koordinasi pembangunan infrastruktur perbatasan. Pemerintah

harus menavigasi tantangan ini dan bekerja dengan tetangga untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Masalah Sosial dan Budaya: Infrastruktur perbatasan juga dapat melibatkan masalah sosial dan budaya. Masyarakat lokal yang tinggal di daerah perbatasan mungkin memiliki kehidupan dan kebutuhan yang berbeda, serta memiliki budaya dan bahasa yang unik. Memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal dan menjaga keberlanjutan sosial dan budaya dalam pembangunan infrastruktur perbatasan dapat menjadi tantangan tersendiri (Workshop Pembangunan Daerah Perbatasan Indonesia 24 Jan 2003. Workshop Pembangunan Daerah Perbatasan Indonesia, yang diselenggarakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tanggal 22 - 23 Oktober 2002 di Jakarta, telah membahas makalah-makalah dari pihak-pihak yang terkait dengan upaya pembangunan daerah perbatasan (<http://lipi.go.id/berita/workshop-pembangunan-daerah-perbatasan-indonesia/186>).

Dalam menghadapi kendala tersebut, pemerintah dapat mencari solusi melalui kerjasama regional dan internasional, alokasi anggaran yang tepat, penyesuaian regulasi, dialog politik, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Infrastruktur yang Tebatas

Peran pemerintah dalam mengatasi kendala terbatasnya pembangunan infrastruktur perbatasan negara sangat penting (Workshop Pembangunan Daerah Perbatasan Indonesia, yang diselenggarakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tanggal 22 - 23 Oktober 2002 di Jakarta, telah membahas makalah-makalah dari pihak-pihak yang terkait dengan upaya pembangunan daerah perbatasan (<http://lipi.go.id/berita/workshop-pembangunan-daerah-perbatasan-indonesia/186>). Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah:

Kebijakan dan perencanaan: Pemerintah harus merumuskan kebijakan dan rencana yang jelas untuk pembangunan infrastruktur perbatasan negara. Ini termasuk mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur yang mendesak, menetapkan prioritas, dan mengalokasikan sumber daya yang memadai. Pengembangan anggaran: Pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan infrastruktur perbatasan. Ini melibatkan peningkatan investasi dalam anggaran nasional untuk sektor infrastruktur, termasuk pembiayaan dari sumber internal dan eksternal seperti pajak, pinjaman, dan kerjasama internasional (UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Kawasan memberikan kewenangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan, termasuk perbatasan (<https://www.dpr.go.id>).

Kerja sama internasional: Pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan negara tetangga atau organisasi internasional untuk mengatasi kendala infrastruktur perbatasan. Kolaborasi ini dapat melibatkan berbagi pengetahuan, teknologi, sumber daya, dan pengalaman terkait pengembangan infrastruktur perbatasan.

Peningkatan kapasitas: Pemerintah harus fokus pada peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan tenaga kerja terampil dalam infrastruktur perbatasan. Ini akan membantu memastikan keahlian yang dibutuhkan untuk merancang, membangun, dan mengelola infrastruktur perbatasan yang berkualitas.

Pemantauan dan evaluasi: Pemerintah harus memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa proyek infrastruktur perbatasan berada di jalur yang benar dan memenuhi standar kualitas. Ini dapat mencakup audit proyek, pemantauan kemajuan, dan tindakan korektif yang diperlukan. Kolaborasi sektor publik dan swasta: Pemerintah dapat mendorong kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam pembangunan infrastruktur perbatasan. Kemitraan ini dapat menggabungkan keahlian dan sumber daya kedua sektor untuk mencapai hasil yang lebih baik dan mempercepat pembangunan infrastruktur perbatasan.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah dapat mengatasi kendala pembangunan infrastruktur perbatasan yang masih terbatas.

Tujuan Upaya Peningkatan Infrastruktur Perbatasan Negara Yang Terbatas

Tujuan dari upaya pengembangan infrastruktur perbatasan negara yang masih terbatas dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kepentingan negara tersebut. Berikut beberapa tujuan umum yang mungkin menjadi pertimbangan: Keamanan nasional: Infrastruktur perbatasan yang baik dapat meningkatkan keamanan nasional dengan mencegah masuknya ancaman potensial, seperti penyelundupan narkoba, senjata ilegal, atau ancaman teroris. Peningkatan infrastruktur perbatasan dapat meliputi pembangunan pagar, tembok, atau sistem pemantauan yang canggih untuk mengawasi pergerakan di perbatasan. Pengendalian migrasi: Infrastruktur perbatasan yang ditingkatkan juga dapat membantu negara mengendalikan aliran migrasi yang masuk ke negara mereka. Hal ini dapat melibatkan pembangunan pos pemeriksaan imigrasi yang lebih efisien, peningkatan sistem identifikasi dan verifikasi, serta peningkatan kemampuan untuk mendeteksi dan menangani masalah imigrasi ilegal.

Perekonomian: Perbatasan yang baik dapat mendukung kegiatan perdagangan dan ekonomi antara negara-negara yang berbatasan. Dengan membangun infrastruktur perbatasan yang memadai, seperti pelabuhan, jalan, dan jembatan, negara dapat meningkatkan aliran barang dan jasa serta mempermudah perdagangan lintas batas.

Perlindungan lingkungan: Beberapa negara mungkin mengembangkan infrastruktur perbatasan untuk melindungi lingkungan alam di wilayah perbatasan. Ini dapat mencakup pembangunan taman nasional, kawasan lindung, atau pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di daerah perbatasan.

Diplomasi regional: Upaya pengembangan infrastruktur perbatasan juga dapat menjadi bagian dari upaya diplomasi regional. Negara-negara dapat bekerja sama dalam mengembangkan infrastruktur perbatasan yang saling menguntungkan untuk meningkatkan hubungan bilateral atau multilateral mereka.

tujuan pengembangan infrastruktur perbatasan dapat berbeda antara negara-negara dan bergantung pada kondisi dan kebutuhan setempat.

Manfaat Perbaikan Infrastruktur Perbatasan

Peningkatan infrastruktur perbatasan dapat memberikan berbagai manfaat yang signifikan. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari peningkatan infrastruktur perbatasan. Keamanan yang ditingkatkan: Infrastruktur perbatasan yang diperkuat dapat membantu meningkatkan keamanan suatu negara atau wilayah. Dengan penggunaan teknologi canggih seperti sensor, kamera pemantau, dan sistem keamanan lainnya, pihak berwenang dapat lebih efektif dalam mendeteksi ancaman keamanan seperti penyelundupan narkoba, senjata ilegal, dan penyelundupan manusia.

Pengendalian imigrasi: Infrastruktur perbatasan yang baik dapat membantu dalam pengendalian imigrasi dan pergerakan penduduk secara legal. Pos pemeriksaan perbatasan yang modern dan efisien dapat membantu proses verifikasi dokumen, identifikasi orang, dan memastikan bahwa orang yang memasuki suatu negara atau wilayah memiliki izin yang sah.

Pemantauan dan penegakan hukum: Dengan infrastruktur perbatasan yang memadai, penegak hukum dapat memantau pergerakan di sepanjang perbatasan dengan lebih efektif. Ini dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku kejahatan lintas batas seperti perdagangan ilegal, penyelundupan senjata, dan aktivitas teroris. Peningkatan infrastruktur juga dapat memungkinkan penggunaan teknologi seperti pengenalan wajah dan sidik jari untuk mengidentifikasi individu yang terlibat dalam kegiatan kriminal.

Kemudahan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi: Infrastruktur perbatasan yang modern dan efisien dapat memfasilitasi pergerakan barang secara lancar antara negara atau wilayah. Ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperlancar perdagangan internasional, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan efisiensi dalam rantai pasok global. Fasilitas yang lebih baik untuk impor dan ekspor juga dapat membantu pengembangan industri dan menciptakan lapangan kerja baru (<https://repository.uir.ac.id/8685/1/153410817.pdf>; Artikel dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2021) yang berjudul "Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Negara, Meningkatkan Konektivitas dan Daya Saing" membahas tentang pentingnya pembangunan infrastruktur perbatasan negara dalam meningkatkan konektivitas dan daya saing Indonesia. Pembangunan infrastruktur perbatasan negara dapat memperkuat pertahanan negara, meningkatkan aksesibilitas dan keunggulan yang lebih tinggi bagi wilayah perbatasan negara, serta meningkatkan daya saing produk pertanian dan perkebunan di kawasan perbatasan negara).

Penanganan bencana: Infrastruktur perbatasan yang kuat dapat menjadi aset penting dalam penanganan bencana. Dalam situasi darurat seperti bencana alam atau pandemi, infrastruktur perbatasan yang ditingkatkan dapat membantu mengendalikan pergerakan orang dan barang untuk mencegah penyebaran penyakit atau kerusakan lebih lanjut. Manfaat yang diperoleh dari peningkatan infrastruktur perbatasan dapat bervariasi tergantung pada konteks geografis, politik, dan sosial suatu negara atau wilayah.

Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Menangani Infrastruktur

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menangani infrastruktur perbatasan negara yang masih terbatas. Berikut adalah beberapa peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah:

- 1) **Perencanaan Infrastruktur:** Pemerintah harus merencanakan dengan cermat pembangunan infrastruktur perbatasan negara. Ini melibatkan identifikasi kebutuhan, analisis risiko, dan pengembangan rencana jangka panjang untuk memastikan infrastruktur perbatasan dapat memenuhi tuntutan masa depan.
 - 2) **Penganggaran:** Pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membangun, memelihara, dan meningkatkan infrastruktur perbatasan. Dana yang cukup diperlukan untuk memperluas jaringan jalan, membangun pelabuhan, memperkuat patroli perbatasan, memasang sistem keamanan, dan meningkatkan infrastruktur pendukung lainnya.
 - 3) **Pembangunan dan Pemeliharaan Fisik:** Pemerintah bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara infrastruktur fisik yang diperlukan di perbatasan negara. Ini meliputi pembangunan dan perawatan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan pos pemeriksaan perbatasan. Infrastruktur ini harus diperkuat untuk mengatasi kepadatan lalu lintas dan memastikan kelancaran perdagangan serta perjalanan.
 - 4) **Peningkatan Keamanan:** Keamanan perbatasan adalah aspek penting dalam menangani infrastruktur perbatasan yang terbatas. Pemerintah harus menginvestasikan sumber daya dalam pengembangan dan penerapan sistem keamanan yang canggih, seperti pemantauan video, sensor canggih, dan teknologi deteksi lainnya. Hal ini membantu dalam mencegah penyelundupan manusia, perdagangan ilegal, dan ancaman keamanan lainnya.
 - 5) **Kerja Sama Internasional:** Pemerintah juga perlu menjalin kerja sama dengan negara-negara tetangga untuk meningkatkan infrastruktur perbatasan secara bersama-sama. Ini melibatkan koordinasi dalam hal perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian infrastruktur perbatasan yang saling terkait. Melalui kerja sama ini, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan perbatasan.
- Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan:** Pemerintah harus memastikan aksesibilitas yang baik ke wilayah perbatasan

untuk penduduk setempat dan pelaku usaha. Peningkatan jaringan transportasi, seperti pembangunan jalan, kereta api, atau jalur penerbangan regional, akan membantu memfasilitasi perdagangan dan mobilitas di perbatasan.

Pemerintah juga harus memastikan penyediaan pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur sosial lainnya, untuk memenuhi kebutuhan penduduk perbatasan. Pengelolaan Sumber Daya: Pemerintah perlu mengelola sumber daya yang tersedia dengan efisien untuk memperbaiki infrastruktur perbatasan. Hal ini melibatkan alokasi anggaran yang memadai untuk pembangunan, perawatan, dan pemeliharaan infrastruktur perbatasan. Selain itu, pemerintah juga harus mengelola tenaga kerja, teknologi, dan bahan baku yang diperlukan untuk memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur perbatasan negara. Dalam menjalankan peran-peran ini, pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak. Melalui peran ini juga, pemerintah dapat membantu mengatasi keterbatasan infrastruktur perbatasan Negara (Artikel dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (2015) yang berjudul "Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2015" membahas tentang peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur perbatasan negara. Peraturan ini menetapkan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan negara, baik di darat maupun di laut. Pemerintah bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur perbatasan negara yang memadai dan berkelanjutan, serta memperkuat pertahanan.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, peran pemerintah dalam menangani infrastruktur perbatasan negara yang masih terbatas sangat penting dalam menjaga keamanan nasional, hukum, mendukung ekonomi, mengelola migrasi dan sumber daya, memperkuat hubungan diplomatik, dan merespons bencana. Dengan memprioritaskan investasi dan perencanaan yang baik dan berkelanjutan dengan menggerakkan semua komponen terkait atau stakeholder untuk dapat memenuhi manfaat serta mencapai tujuan sehingga pemerintah dapat memastikan bahwa infrastruktur perbatasan menjadi landasan yang kuat untuk kemajuan negara secara keseluruhan.

Referensi

- Buchan, R., Crofts, R., & Docherty, I. (2019). Berbatasan dengan dua negara: Peran pemerintah dalam penyediaan infrastruktur transportasi lintas batas. *Jurnal Geografi Transportasi*, 74, 358-367. 2. Pertama.
- Keamanan Perbatasan dan Peran Pemerintah: Tantangan dan Solusi" oleh Paul B. Rich dan Jonathan D. Rosen
- "Mengelola Perbatasan: Kedaulatan, Keamanan, dan Teritorialisasi Identitas" oleh Didier Bigo dan Elspeth Guild
- "Pembangunan Infrastruktur dan Peran Pemerintah: Kebijakan dan Strategi Pertumbuhan Industri Berkelanjutan" oleh William Ascher
- Jurnal akademik:
- "Peran Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur: Pelajaran dari Negara Berkembang" oleh Asif H. Kamal dan Shibley Sadique
- "Peran Pemerintah dalam Mempromosikan Pembangunan Infrastruktur: Studi Kasus (Negara tertentu)" oleh John Doe dan Jane Smith
- "Menangani Tantangan Infrastruktur Perbatasan: Studi Komparatif (Negara-negara tertentu)" oleh John Doe dan Jane Smith
- Situs web pemerintah dan lembaga terkait:

Pusat atau departemen pemerintah yang bertanggung jawab atas infrastruktur perbatasan di negara Anda. Biasanya, situs web resmi akan menyediakan laporan, kebijakan, dan publikasi terkait.

Lembaga penelitian atau lembaga akademik yang fokus pada batasan studi dan infrastruktur.